

**PENGAWASAN AKTIVITAS KAPAL
PENANGKAPAN IKAN DI PANGKALAN
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

Cindy Nadia Purba

171010060

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

**PENGAWASAN AKTIVITAS KAPAL
PENANGKAPAN IKAN DI PANGKALAN
PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN
PERIKANAN KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh :

Cindy Nadia Purba

171010060

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2022**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Cindy Nadia Purba
NPM : 171010060
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora
Program Studi : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “SKRIPSI” yang saya buat dengan judul:

PENGAWASAN AKTIVITAS KAPAL PENANGKAPAN IKAN DI PANGKALAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, disalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 16 Januari 2022



Cindy Nadia Purba
171010060

**PENGAWASAN AKTIVITAS KAPAL
PENANGKAPAN IKAN DI PANGKALAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Cindy Nadia Purba
171010060**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 16 Januari 2022



Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si.

Pembimbing



Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Wilayah Kota Batam yang dikelilingi laut memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Adanya aktivitas kapal penangkap ikan yang banyak ditemui di sepanjang laut Kota Batam. PSDKP Kota Batam merupakan organisasi dibawah naungan KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) memiliki tugas dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan yang ada di Kota Batam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran PSDKP dalam melakukan pengawasan aktivitas kapal penangkap ikan di Kota Batam. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam masih kurang dikarenakan beberapa faktor yaitu kurangnya sumber daya manusia dan terbatasnya biaya anggaran yang dimiliki PSDKP Kota Batam. Adanya kapal penangkap ikan yang juga belum memiliki dokumen yang lengkap. Hal yang perlu dilakukan oleh PSDKP Kota Batam antara lain menambah jumlah pengawas perikanan yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas pengawasan aktivitas kapal ikan yang lebih baik, menjaga koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan mengusulkan penambahan biaya anggaran untuk meningkatkan jumlah kapal patrol.

Kata Kunci : Pengawasan; Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan; PSDKP Batam

ABSTRACT

The sea-surrounded Batam area has the potential for Marine and Fisheries resources. The activity of large fishing vessels is observed along the city's sea of Batam. PSDKP Batam city is under the KKP (Ministry of Marine Affairs and Fisheries) which oversees the resources and fisheries available in Batam. The purpose of this research is to know the role of PSDKP in overseeing fishing operations in Batam, The method used in this research is a qualitative descriptive method. The data-collection techniques used in this research include interviews, observation and documentation. The results of this research show that the control conducted by PSDKP is still lacking due to some factors, the lack of personnel and limited budget owned by PSDKP. There are still fishing vessels that have incomplete documents. The things PSDKP need to do are improving the number of qualified fisheries supervisors for better supervision of fishing vessels, maintaining good coordination with those involved in supervision of fishing vessels, and proposing an additional budget to get extra patrol boats.

Keywords : Supervision; Fishing Vessel Activity; PSDKP Batam

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat dan kasih-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran dapat diberikan untuk melengkapi kekurangan skripsi. Penulis ingin memberikan ucapan terimakasih bagi orang-orang yang terlibat baik dalam memberi arahan, bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
4. Bapak Dedi Epriadi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam;
5. Dosen-dosen Prodi Administrasi Negara dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Orang Tua dan adikku yang selalu mendoakan dan memberikan semangat;
7. Rainhard Pardede yang selalu mendoakan dan memberikan semangat
8. Teman-teman mahasiswa/i Universitas Putera Batam Prodi Administrasi Negara Angkatan 2017
9. Bapak Salman Mokoginta, Selaku Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam;

10. Bapak Muhammad Syamsu Rokhman, S.Pi., Selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran ;
11. Bapak Martin Yeremias Luhulima, S.H, M.Si., Selaku Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
12. Bapak Muslani, S.St.Pi., M.H. Selaku Kepala Subbagian Tata Usaha yang membantu penulis dalam melakukan penelitian;
13. Masyarakat Nelayan yang membantu sebagai Informan dalam wawancara;

Semoga semua yang terlibat diberikan berkat yang melimpah. Amin.

Batam, 16 Januari 2022

Cindy Nadia Purba



Universitas Putera Batam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUNG	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian.....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis	8
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kajian Teori.....	11
2.1.1 Definisi Manajemen dalam Administrasi Publik	11

2.1.2 Fungsi Manajemen dalam Administrasi Publik	12
2.1.3 Definisi Pengawasan	14
2.1.4 Tujuan Pengawasan	15
2.1.5 Prinsip Pengawasan	16
2.1.6 Bentuk Bentuk Pelaksanaan dan Pengawasan.....	17
2.1.7 Teknik Pengawasan	17
2.1.8 Tahapan Pengawasan	18
2.1.9 Direktorat Jenderal Teknik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.....	19
2.1.10 Pengertian Pelabuhan	24
2.1.11 Pengertian Pelabuhan Perikanan	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	25
2.3 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Sifat Penelitian	31
3.3 Lokasi dan Periode Penelitian	32
3.3.1 Lokasi Penelitian	32
3.3.2 Periode Penelitian	32
3.4 SumberData.....	33
3.5 Metode Pengumpulan Data	34
3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian	34
3.7 Metode Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian	28
4.1.1	Lokasi Hasil Penelitian	28
4.1.2	Struktur Organisasi	38
4.1.3	Tugas dan Fungsi PSDKP	39
4.1.4	Sarana dan Prasarana	40
4.1.5	Sumber Daya Manusia.....	40
4.2	Deskripsi Karakteristik Responden	41
4.3	Deskripsi Jawaban Informan	42
4.4	Analisis Data.....	56
4.5	Pembahasan	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....		69
5.1	Simpulan.....	69
5.2	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN.....		xiv
Lampiran 1. Pendukung Penelitian		xiv
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup		xx
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian		xxi

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	30
Gambar 3.1 Komponen analisis data (<i>Interactive model</i>)	36
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	38

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Sampel Data Frekuensi Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Yang Memiliki Izin SLO Tahun 2020	6
Tabel 3.1 Periode Penelitian.....	33
Tabel 4.1 Sarana dan Prasarana di Pangkalan PSDKP Kota Batam	39
Tabel 4.2 Tenaga Kerja di Pangkalan PSDKP Kota Batam.....	40
Tabel 4.3 Narasumber Wawancara di Pangkalan PSDKP Kota Batam	41



Universitas Putera Batam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai seluas 81.000 kilometer dan mempunyai 17.500 pulau dan daratan 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak diantara dua samudra dan dua benua dan Negara Indonesia berbatasan dengan 10 Negara yaitu Negara Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Australia dan negara lainnya . perairan Indonesia berubah ubah luasnya sesuai dengan aturan pada masanya menurut salah satu pakar Fakultas Hukum Universitas Indonesia menyatakan pada era kolonial Belanda adanya ketentuan Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie atau yang disingkat dengan (TZMKO) pada tahun 1939 yang memiliki prinsip Mare Liberum (Freedom Of The Sea) yang dikemukakan oleh ahli hukum Internasional asal Belanda Hugo Grotius (1604) (Umar, 2021)

Pada Tanggal 13 Desember Tahun 1957 Pemerintah Indonesia Mengumumkan wawasan Nusantara dikenal sebagai Deklarasi Juanda, Deklarasi ini menetapkan kawasan perairan Indonesia di dalam kepulauan Indonesia langsung menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia dan ketentuan pengukuran 3 mil dari garis tiap pantai diubah menjadi 12 mil , pada April tahun 1982 bentuk dan konsep wawaan nusantara diterima dan menjadi bagian dari konvensi hukum laut internasional hasil konferensi PBB berkaitan dengan hukum laut yang ketiga atau yang disingkat dengan (UNCLOS) lalu

pengukuran 12 Mil tadi ditetapkan sebagai kawasan ZEE yang cakupannya mencapai sekitar 200 mil dari garis pantai setiap pulau di Indonesia, Untuk Kawasan Zona Zee, Kewenangan hanya sebatas mengelola melestarikan dan memelihara kekayaan alam Indonesia, wilayah 12 mil tadi Indonesia memiliki kedaulatan dan wewenang penuh yang ada didarat, perairan wilayah, dan tanah dibawah permukaan air dan ruang udara yang ada diatas. Memahami pengertian tentang sejarah sekaligus tentang aturan yang berlaku dan terkait penentuan atau penetapan territorial adalah keharusan , seperti negara Malaysia sebenarnya mengakui dan menjadi bagian anggota UNCLOS semenjak kemenangan klaim antara pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia semakin percaya diri dan tetap berpatokan pada wilayah yang dibuat sendiri pada tahun 1979 yang disebut klaim unilateral, peta tersebut memasukan sejumlah perairan wilayah Indonesia didalam wilayah Malaysia, Maka terjadinya sengketa perairan pada kasus perairan ambalat di Pulau Bintan.(KOMPAS, 2021)

Kota Batam memiliki geografis yang sangat strategis di jalur pelayaran dunia internasional Kota Batam berdasarkan peraturan daerah nomor 2 Tahun 2004 luas wilayah Kota Batam seluas 3.990,00 KM dan luas wilayah laut 2.950 km , Kota Batam berbatasan dengan sebelah utara Selat Singapura, sebelah selatan: kecamatan senayang, sebelah barat: kecamatan Karimun dan Moro kabupaten karimun dan sebelah timur “kecamatan Bintan Utara perairan kawasan Kota Batam rata rata 28 ppt tingkat kecerahan sekitar antara 2-3 meter (KKP, 2021).

Salah satu sumber daya laut adalah perikanan yang diandalkan untuk kemajuan pembangunan nasional, hasil perikanan Indonesia pada tahun 2019 Mencapai harga RP.73.681.883.000 naik pada angka 10.1 % Jenis hasil laut seperti cumi-cumi, tuna, rumput laut yang paling banyak dicari jenis ekosistem yang ada di laut, di Indonesia banyak hasil ikan perlu di dijaga dan di perhatikan, jika tidak ada pengelolaan yang baik, Perikanan di Indonesia rentan akan pelanggaran, pembuatan kawasan perairan di indonesia merupakan bagian dari usaha Indonesia dalam upaya menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan, selain bentuk perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi juga bertujuan untuk penggerak ekonomi yaitu program pariwisata perairan dan sebagai sarana sosial unutm mensejahterakan masyarakat, konservasi perairan di Indonesia pada Desember tahun 2019 memiliki luas yang mencapai hingga 23.14 juta hektar dari luas perairan Indonesia, 166 dikelola Kementrian kelautan 30 diantaranya dikelola oleh kementrian Lingkungan hidup dan kehutanan., pada tahun 2030 diperkirakan menargetkan atau terbentuknya kawasan konservasi perairan seluas 32.5 juta hektar, Indonesia harus bekerja keras agar target yang sudah di upayakan atau dicapai, dengan adanya kekayaan sumber daya laut perikanan yang dimiliki Indonesia pasti mampu dan menjadi pemimpin disektor atau bagian kelautan (O. Pratama, 2021)

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17/PERMEN-KP 2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas perikanan memiliki tugas sebagai pemeriksaan ketertiban administrasi dokumen kapal

yang dimiliki nelayan dan memeriksa alat Tangkap ramah lingkungan yang digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan.

Menteri Kelautan dan Perikanan merevisi dan evaluasi peraturan yang mengatur tentang penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu cantrang, Nelayan yang ada di Kepulauan Riau (Natuna) tidak setuju alat tidak ramah lingkungan yaitu cantrang di Legalisasi akan berdampak pada kelestarian lingkungan hidup dan ekosistem yang ada dilaut, Menurut Bapak Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan Dan perikanan, tim dan anggotanya akan mengevaluasi peraturan tentang Jalur Penangkapan ikan yang ada di Kota Batam dan alat penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan. Evaluasi tersebut ditujukan untuk bagian yang mengizinkan kembali penggunaan alat tidak ramah lingkungan yaitu cantrang, bagian yang merusak lingkungan akan team dan anggota kami hindari (Umar, 2021).

Pada Permen KP No 59/2020 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan penggunaan alat penangkapan ikan di WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia) Didalam Bab III pasal 5 (lima) pada Permen KP No 59/2020 Alat Penangkapan (API) adalah sarana untuk alat penangkap ikan yang diperbolehkan yaitu jari lingkar, pukot tarik, pukot hela, penggaruk, jaring angkat, alat jala yang ditebarkan, perangkap, dan pancing (Permenkp, 2020) Data yang dimiliki saat ini, ada sebanyak 6.800 buah dan 680 buah kapal cantrang diantaranya berukuran 30 GT dan dari 115.000 rumah tangga itu sumber kehidupannya berasal dari hasil menangkap ikan (Umar, 2021).

Permen KP No 59/2020 Pada pasal 23 ayat (4) menyebutkan bahwa kapal cantrang berukuran diatas sekitar 30 gros ton boleh diizinkan untuk beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia 711, tepatnya di Laut Natuna Kepulauan Riau, salah satu Nelayan natuna mengungkapkan jika penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan yaitu cantrang bisa mengakibatkan kerusakan ekosistem laut yaitu karang yang menjadi rumah ikan, karna wilayah pengelolaan perikanan di laut jawa sudah *overfishing* atau ikannya sudah habis maka dari itu kapal cantrang ingin beroperasi di laut natuna, jika penggunaan kapal cantrang di laut natuna maka kelestarian laut akan rusak karena menggunakan cantrang, bapak Wahyu sebagai Menteri menegaskan bahwa Permen KP No 59 Belum disahkan maka belum diberlakukan masih dalam proses peninjauan oleh karena itu kapal cantrang yang ada dilaut jawa belum diperbolehkan untuk beroperasi di laut Natuna kepulauan riau (Umar, 2021). namun PSDKP kota batam juga menemukan kapal yang sudah memiliki SIPI namun jalur daerah penangkapan ikannya tidak sesuai yang ada di SIPI (KKP.GO.ID, 2021) PSDKP Kota Batam juga menangkap nelayan yang berada di perairan lingga karna kapal nelayan tersebut menangkap ikan tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan yang dibuat oleh pemerintah karena nelayan tersebut menangkap ikan dengan menggunakan trawl yang dapat merusak ekosistem yang ada dilaut, akhirnya nelayan tersebut diproses oleh pihak PSDKP KOTA BATAM (BATAM, 2021) Selanjutnya masih ada pengguna kapal yang sudah memiliki Surat Laik Operasi atau yang disebut SLO masih tidak mematuhi aturan yaitu masih ditemukannya alat tangkap

yang tidak ramah lingkungan dan muatan yang tidak sesuai dengan SLO yang dimiliki oleh pihak PSDKP Kota Batam Pada Tahun 2020 seperti dibawah ini

:

Tabel 1.1 Sampel Data Frekuensi Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Yang Memiliki Izin SLO Tahun 2020

No	Nama Kapal	Jenis Kapal	Nama Pemilik	Tujuan Pangkalan	Sipi & Sikpi	Kepatuhan Kapal
1	Mitra Karimun 2	Pengangkut/ Pengumpul	PT Indonesia Marciture	Pp Moro dan Tanjung Balai Karimun	019/SIKPI-KAN-KRM 007	Tidak Patuh
2	Nelayan 2017-750	Penangkap	Syawal	Pu.P.Abang Batam	B.218/SIPI-KAN/BTM/2018	Tidak Patuh
3	ANUGERAH BAHARI	Penangkap	TONDI MARYONO	ZEEI WPP NRI 711 (ZEEI L. Cina Selatan)	26.20.0001.01.48243	Patuh
4	AS ROMA	Penangkap	SASCO MARITIM INDONESIA, PT	WPP NRI 572	26.20.0001.42.40209	Patuh
5	BINTANG NATUNA	Penangkap	PO Tjai	L. Cina Selatan, L. Natuna, Sl.	26.20.0001.01.00820	Patuh
6	DARWIN FORTUNA	Penangkap	TJENG HOK	PP. Telaga Punggur	26.20.0001.01.00499	Patuh
7	DELI ASAHAN	Penangkap	MITRA MAJU LESTARI, PT.	L. Cina Selatan	26.19.0001.01.44432	Patuh
8	ELANG LAUT 219	Penangkap	SUGIOMAN	Perairan Laut Prov Kepri > 6 Mil	064/SIPI-KAN/BTM/2020	Patuh
9	KM. JAMAIN	Penangkap	IRWAN	Sl. Karimata	26.20.0001.01.48922	Patuh

(Sumber : Pangkalan PSDKP Kota Batam, 2021)

Berdasarkan pada kasus tabel 1.1 menyatakan bahwa pada tahun 2020 masih ada ditemui beberapa kapal yang sudah memiliki izin surat laik operasi namun masih menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan oleh tim pengawasan PSDKP Kota Batam. Hal tersebut menunjukkan kepemilikan SLO tidak menjamin bahwa akan patuh sepenuhnya. Untuk itu tugas tim pengawasan terhadap kapal-kapal yang sudah memiliki SLO adalah melihat keabsahan SIPI dan SIKPI, memeriksa muatan memeriksa alat tangkap, memeriksa komposisi buah anak kapal, memeriksa kesesuaian muatan.

Dari pemaparan masalah diatas, peneliti akan membahas mengenai **“Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan Di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam”**

1.2 Identifikasi Masalah

Pada penelitian ini, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi pada sumber daya laut dan perikanan kota batam

1. Ditahun 2020 Adanya ditemukan penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan yang tidak sesuai dengan SLO (Surat Laik Operasi) yang dimiliki.
2. Kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) di PSDKP Batam dari banyaknya tugas yang harus diselesaikan dan wilayah kerja pengawas PSDKP yang ada di Batam.

1.3 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menentukan batasan masalah yaitu penelitian di kota Batam, pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di pendahuluan dan latar belakang, peneliti memerlukan indentifikasi masalah yaitu Bagaimana Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan di Pangkalan PSDKP Kota Batam?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Penjelasan diatas tujuan dari penelitian skripsi ini untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan di Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kota Batam

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian Skripsi ini diharapkan memberi manfaat bagi si pembaca dan khalayak ramai, adapun manfaat yang diperoleh yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi pengembangan dan ilmu pengetahuan wawasan dalam menerepkan ilmu metode penelitian skripsi mengenai “Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkapan Ikan di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Kota Batam.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti Skripsi, dapat memantapkan ilmu yang sudah didapat selama pelajar perkuliahan studi Ilmu Administrasi Negara Di Universitas Putera Batam.
2. Bagi Pengelolaan Pelabuhan Dan Pangkalan PSDKP Kota Batam sebagai evaluasi peningkatan kinerja serta meningkatkan efektivitas kapal perikanan di PSDKP Kota Batam



Universitas Putera Batam

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Pada bab ini peneliti menggunakan beberapa teori untuk mendukung masalah pada skripsi untuk panduan dalam penelitian dan mendukung masalah mengenai judul penelitian yang diangkat yaitu “Pengawasan Aktivitas Penangkapan ikan di Pangkalan Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kota Batam “

2.1.1 Definisi Manajemen dalam Administrasi Publik

Definisi Manajemen sebagai Ilmu yang masuk akal dan tersistem untuk mencapai tujuan bersama didalam organisasi secara efektif untuk menjalankan peran masing masing yang terkait pada kepentingan (NUGROHO, 2017) .

Menurut pengertian manajemen memiliki 3 definisi manajemen yaitu :

Pada Encyclopedia Of the Social Sciences Manajemen diartikan sebagai bagian dari suatu proses untuk tujuan organisasi tertentu yang di mana prosesnya diawasi (FIRMANSYAH, 2018)

Manajemen menurut Haimann Bertujuan untuk melakukan kegiatan orang lain atau aktivitas organisasi dan mengawasi usaha individu untuk mencapai tujuan bersama

George R. Terry mengartikan manajemen adalah tujuan yang sudah ditetapkan di awal atau terlebih dahulu dengan menggunakan kegiatan orang lain atau organisasi

2.1.2 Fungsi Manajemen dalam Administrasi Publik

Fungsi manajemen bagian dasar pada proses manajemen yang menjadi ukuran manager untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya. Fungsi manajemen sebagai berikut

1. *Organizing* (organisasi)

Bagian kegiatan untuk melakukan penetapan suatu organisasi dan fungsi kedudukan atau unit relasi masing masing organisasi tersebut

2. *Forecasting*

Bagian dari kegiatan meramalkan, atau mengadakan taksiran yang akan terjadi sebelum suatu rencana yang lebih pasti dilaksanakan

3. *Planning*

Bagian tentang perencanaan penetapan yang harus dicapai atau penentuan perangkaian untuk mencapai hasil yang diinginkan

4. *Staffing atau Assembling Resources*

Luther Gulick , Harold Koontz menyatakan staffing berupa penyusunan personalia atau anggota pada organisasi sejak merekrut tenaga kerja agar setiap petugas memberikan hasil maksimal kepada organisasi.

5. *Directing atau Commanding*

Fungsi yang berhubungan untuk memberi bimbingan , saran atau perintah kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan benar (FIRMANSYAH, 2018)

6. *Leading*

Menurut pakar Lois A Allen merupakan salah satu bagian fungsi manajemen sebagai pekerjaan yang dilakukan manager yang menyebabkan orang lain untuk bertindak .

7. *Coordinating*

Salah satu fungsi atau bagian dari manajemen ini disebut dengan pengendalian dan mengadakan penilaian sehingga apa yang dapat dilakukan bawahan dapat ter arah .

8. *Motivating*

Kegiatan pendorong berupa pemberian inspirasi ,semangat ide kepada bawahan sehingga bawahan lebih semangat melaksanakan tugas tugas

9. *Controlling*

Pengawasan penilaian dan sekaligus mendakan koreksi atau mengadakan arahan yang sedang dilakukan bawahan untuk mencapai tujuan bersama didalam suatu organisasi

10. *Reporting*

Pelaporan penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan didalam suatu organisasi yang berhubungan dengan fungsi dan tugas sehingga yang menerima laporan mendapatkan hasil atau gambaran dalam memberi hasil laporan

2.1.3 Definisi Pengawasan

Menurut T. Hani Handoko “Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang menetapkan standar pelaksanaan yang ditetapkan untuk tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik ,serta mengambil tindakan atau kebijakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya yang digunakan di perusahaan atau organisasi cara paling efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan pada organisasi atau perusahaan (R. Pratama, 2020) dan menurut M. Manullang definisi pengawasan pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan atau dilakukan dan bisa menilainya atau mengoreksinya supaya pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana semula (Suadi, 2021) Menurut Sarwoto pengawasan adalah kegiatan atau aktivitas manager yang mengupayakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang diinginkan atau dikehendaki (Suadi, 2021) lalu menurut Harold Koonz tentang pengawasan itu adalah pengukuran atau batasan dan pembetulan terhadap kegiatan atau aktifitas para bawahan untuk menjamin adanya bahwa apa yang dilaksanakan itu cocok dan sesuai dengan rencana yang diinginkan di setiap organisasi (Suadi, 2021), pengawasan pada intinya mengindari

adanya kejahatan,kecurangan ,pelanggaran yang dilakukan, karena adanya pengawasan untuk membantu pelaksanaan berjalan lancar sesuai dengan rencana karna adanya pengawasan kita bisa mengavaluasi hasil kinerja kita sejauh mana sudah dilaksanakan (Abbas, 2020)

2.1.4 Tujuan Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajerial sebagai salah satu fungsi managerial mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlakukan dan suatu pelaksanaan tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan jelas akan mengakibatkan lambatnya dan tidak tercapainya suatu sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan terlebih dahulu (Suadi, 2021) Adapun menurut Ranupandojo tujuan pengawasan mengusahakan agar suatu pekerjaan terlaksana sesuai dengan tujuan yang sudah dikehendaki .untuk meningkatkan disiplin kerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi perlu diadakannya pengawasan karna pengawasan memiliki tujuan yang berguna bagi pihak yang melaksanakan atau menjalankan tugas dan tujuan pada pengawasan (Suadi, 2021)

Menurut para ahli termasuk Soekarno dalam Gouzali Syadam tujuan pengawasan sebagai berikut yaitu (Suadi, 2021) :

1. Untuk mengetahui pada suatu kegiatan yang sedang berlangsung atau sudah berjalan sesuai dengan rencana
2. Untuk mengetahui sudakah kegiatan tersebut sesuai dengan intruksi atau arahan
3. Untuk mengetahui apakah kegiatan telah berjalan dengan efisien
4. Untuk memahami kesulitan dan kelemahan dalam kegiatan pada organisasi
5. Untuk mencari jalan keluar atau pintas jika terjadi adanya kesulitan kelemahan atau kegiatan arah perbaikan

2.1.5 Prinsip Pengawasan

Prinsip pengawasan adalah output dari yang diinginkan makan pimpinan organisasi atau perusahaan, Prinsip pengawasan menurut Georgy R Terry dalam prinsip pengawasan yang efektif dan efisien yaitu berlangsung sesuai dengan rencana atau plan sebelumnya.

Menurut Ulbert silalahi pandangannya mengenai pengawasan yaitu:

1. Pengawasan harus dilakukan secara langsung dan berkala dalam menilai, menganalisis, objektivitas yang dilakukan didalam pengawasan
2. Pengawasan bukan menemukan suatu kesalahan dalam pengawasan tetapi menemukan kekurangan didalam pengawasan lalu di perbaiki cara kinerja pengawasan

3. Harus adanya bimbingan atau arahan dalam pengawasan
4. Tidak menghambat atau memperlambat pekerjaan tetapi harus memiliki efisiensi hasil terhadap pengawasan
5. Dalam pengawasan harus efektif dan efisien
6. Pengawasan harus memiliki tujuan dan rencana yang sudah ditetapkan
7. Pengawasan dilakukan ditempat yang akan diawasi

Dari semua kegiatan pengawasan harus ada yang namanya evaluasi atau perbaikan kinerja dalam pengawasan (Suadi, 2021).

2.1.6 Bentuk Bentuk Pelaksanaan dan Pengawasan

Menurut Ahli Suwoto mengatakan ada 3 bentuk bentuk pengawasan yaitu (Fendi, 2021) :

1. Pengawasan Hukum yaitu suatu pengawasan ditujukan untuk mengetahui wewenang
2. Pengawasan Administratif yaitu bentuk pengawasan untuk mengukur efisiensi kerja
3. Pengawasan politik bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur kapasitas pada segi kemanfaatan

2.1.7 Teknik Pengawasan

Menurut Siagian, teknik pengawasan yang digunakan yaitu :

1. Pengamatan secara langsung, pengamatan ini melihat sendiri secara langsung petugas operasional mengadakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya
2. Mengenai laporan baik tulisan dan lisan dari para petugas yang mengawasi secara langsung aktivitas dan kegiatan para bawahannya
3. Penggunaan kuesioner yang *feedback* atau responnya sangat berguna dan bermanfaat jika perbaikan lebih kearah baik
4. Wawancara dengan para penyelenggara operasional untuk melakukan pengawasan.
5. Teknik pengawasan, ada yang menggunakan pengawasan kuesioner dan wawancara menggali informasi tergantung :
 - a. Kejelasan wawancara
 - b. Target waktu menentukan penyelesaian tugas
 - c. Dukungan keuangan atau dana.
 - d. Sarana dan prasana
 - e. Sifat atasan secara langsung
 - f. Standar mutu hasil pekerjaan
 - g. Toleransi terhadap deviasi yang dapat diterima

2.1.8 Tahapan Pengawasan

Tahapan pengawasan ada 5 (lima) yaitu :

1. ***Planning*** yaitu perencanaan organisasi atau perusahaan membuat suatu tujuan yang akan dilaksanakan pencapaian pengawasan tersebut.
(Poernomo, 2020)

2. **Programming** adalah tahapan pengawasan untuk mencapai agenda atau kegiatan yang sudah direncanakan dengan memilah dan membatasi hambatan atau masalah yang ada diluar organisasi (Poernomo, 2020)
3. **Result Checking** yaitu mengevaluasi tiap organisasi atau perusahaan sudah mencapai tujuan atau tidak didalam pengawasan (Poernomo, 2020)
4. **Shifting Analysis** yaitu adanya pergantian pengawasan yang direncanakan (Poernomo, 2020)
5. **Corrective action implementation** untuk melakukan efektivitas dan efisiensi agar pengawasan dilakukan secara optimal sesuai arahan dan tujuan yang direncanakan.(Poernomo, 2020)

2.1.9 Direktorat Jenderal Teknik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

a. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan

Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP/2020 Tentang Teknik Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu mempunyai tugas sebagai pelaksanaan sesuai dengan undang undang dan kegiatan ini menjamin terciptanya tata tertib pelaksanaan ketentuan perundang undangan dibidang perikanan.pengawasan biasanya dilakukan pada saat kapal mau berlayar maka dilakukan pemeriksaan kesesuaian administrasi bukan kesesuaian administrasi saja tapi teknis dan fisik kapal ketiga kapal hendak berangkat pengawasan dilakukan apakah kapal tersebut

sudah patuh dan sesuai dengan ketentuan yang ada di SLO Surat Laik Operasi. (Purwangka et al., 2019)

b. Tata Cara Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Perikanan Sebagaimana Maksud Pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 69/PERMEN-KP 2020 pasal 2 Tentang Pengawasan Perikanan yaitu dalam melaksanakan tugasnya adalah yaitu :

1. Pembagian ,dan mengevaluasi bagian rencana suatu program yang sudah dibuat serta hasil laporan pada pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan .
2. Melakukan pengadaan dan pemanfaatan pada sumber daya kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan
3. Adanya Suatu Penyuluhan atau proram rencana kepada masyarakat
4. Adanya persiapan dan pemeliharaan kapal pengawasan perikanan yang akan beroperasi
5. Adanya Pemanfaatan dan hasil guna pada kapal pengawasan perikanan
6. Adanya Pengolahan Prasarana dan Sarana yang sudah ditetapkan sumber daya kelautan dan perikanan
7. Urusan tentang kegiatan tulis menulis kegiatan administrasi atau tata usaha dalam sumber daya kelautan dan perikanan

c. Pelaksanaan tugas pengawas perikanan di Kapal Perikanan

Biasanya tugas pengawas perikanan pada kapal perikanan biasanya dilakukan Pelabuhan perikanan kegiatan patroli dilaut dilakukan oleh pengawasan dan menjadi tanggung jawab petugas perikanan mengetahui kinerja pengawas perikanan dalam melakukan patroli pengawasan dilakukan dengan menggunakan speedboat sebagai sarana untuk melakukan pengawasan di laut. (Aji et al., 2016)

Tugas pengawas perikanan dikapal perikanan di kapal perikanan pasal 8 huruf b yaitu :

1. Adanya Kapal Penangkapan Ikan
2. Adanya Kapal Pengangkut ikan
3. Adanya Kapal Yang Mengelola Hasil ikan
4. Adanya Kapal Latih ikan
5. Adanya Kapal Melakukan Kegiatan Penelitian
6. Adanya Kapal untuk operasi atau patroli penangkapan ikan atau budidaya ikan didalam kegiatan pengawasan dikapal perikanan

d. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan Pada Kapal Penangkapan ikan

Kegiatan atau tugas pengawas perikanan tercantum pada ayat 1 yaitu :

1. Kelengkapan surat, Asli yang sesuai SIPI atau SIKPI surat laik operasi dan surat yang menyatakan persetujuan untuk berlayar

2. Dalam pengembangan perikanan harus adanya kesesuaian izin kelengkapan surat
3. Adanya Peralatan atau memiliki kamera pemantau agar bisa lanvar melakukan kegiatan pengawasan
4. Adanya Kapal Perikanan, alat tangkap untuk ikan
5. Adanya SDM atau anak buah kapal perikanan
6. Adanya bagian Pemantau atau monitoring didalam kapal penangkapan ikan sesuai dengan ukuran kapal
7. Adanya penanganan ikan sesuai dengan prosedur berlaku diatas kapal perikanan
8. Adanya prosedur yang sesuai untuk menangani ikan diatas kapal perikanan
9. Adanya Prosedur yang sesuai dengan berbagai jenis ikan yang ditangkap dengan SIKPI
10. Memiliki Pelabuhan pangkalan dan pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan hasil yang ditangkap oleh nelayan .
11. Harus sesuai dengan daerah yang sudah diatur oleh SIPI
12. Jenis ikan yang harus diangkut dengan jenis ikan yang diperbolehkan untuk diangkut
13. Adanya Keaslian yang sesuai dengan sertifikat dan bentuk kriteria pada kepatuhan HAM pada Usaha Perikanan (Purwangka et al., 2019)

e. Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan

SLO yaitu surat keterangan yang berisi tentang administrasi kapal perikanan yang sudah memiliki syarat surat administrasi yang sudah layak untuk melakukan kegiatan perikanan di perairan sebagai acuan pengawasan perikanan, nahkoda atau pemilik operator kapal perikanan dan penanggung jawaban perusahaan perikanan dalam penerbitan SLO dalam melakukan kegiatan perikanan (PRIHADI AJI, SINGGIH, S.PI, 2017) standar pelayanan SOP pengawasan yang dilakukan PSDKP perikanan tangkap yaitu pemeriksaan administrasi dan dokumen, pemeriksaan fisik kapal secara teknis, jumlah ABK, daerah operasi yang sesuai di SLO untuk penangkapan ikan, alat tangkap yang digunakan ramah lingkungan atau tidak (Bilhuda et al., 2018)

f. Syarat Ketentuan Dan Penerbitan SLO

SLO diterbitkan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan dan administrative dan kelayakan teknis adapun persyaratan administrative yang harus bagi penangkapan kapal ikan yaitu :

1. Persyaratan Administrasi (KEMENPAN, 2021)

- a. SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) Asli
- b. SKAT (Surat Keterangan Aktivasi Transmitter) Asli Untuk Penggunaan kapal ikan ukuran diatas 30 GT
- c. SLO (Surat Laik Operasi) yang sudah melakukan kegiatan aktivitas penangkapan ikan

d. Keselarasan atau sesuai dengan pelabuhan pangkalan dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) (KEMENPAN, 2021)

2. Persyaratan Kelayakan Teknis (KEMENPAN, 2021)

a. Kesesuaian atau keselarasan fisik kapal pendukung operasi pembudiyaaan ikan yang terdiri bahan kapal, merek pada kapal, nomor pada mesin utama kapal ,tanda selar pada kapal , dan nama atau julukan (panggilan)

b. Kesesuaian atau keselarasan jumlah ikan yang akan diangkut dengan daya tampung tempat penyimpanan ikan

c. Keaktifan transmitter pada SPKP (Sistem Pemantauan Kapal Perikanan) untuk mendukung kegiatan operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran diatas 30 GT (*Gross Tonnage*). (KEMENPAN, 2021)

2.1.10 Pengertian Pelabuhan

Menurut C. Verlaque (1975) Pelabuhan laut adalah sesuatu tempat yang berlangsung atau terjadinya kontak antara transportasi atau alat kendaran melalui laut atau pun darat seperti mobil dan kereta api. (Lubis, 2019)

A. Vigarie mengatakan dan melengkapi definisi Menurut C. Verlaque (1975) yaitu bahwa pelabuhan yaitu suatu wilayah yang terjadi antara dua bidang atau sirkulasi daratan dan sirkulasi maritime (laut/perairan) Departemen Perhubungan Laut mengartikan pelabuhan adalah tempat berlabuh atau tempatnya sandaran kapal laut untuk menaikan dan

menurunkan penumpang kapal , adanya bongkar muat barang atau aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan tersebut .(Lubis, 2019)

Pengoperasian pelabuhan juga bisa dapat *feedback income* yang jika dikelola dengan baik diantaranya pelabuhan niaga , pelabuhan perikanan, atau pun pelabuhan lainnya karna pelabuhan memiliki fungsi yang komersial atau memiliki nilai jual beli pelabuhan secara tidak langsung akan menumbuhkan angka perekonomian kota .(Lubis, 2019)

2.1.11 Pengertian Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan Perikanan adalah pelabuhan khusus yang penggunaannya atau pemakaiannya digunakan untuk aktivitas sektor pertambangan atau pertanian, pelabuhan perikanan antara wilayah daratan dan wilayah lautan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sejak ikan didaratkan dan juga didistribusikan.(Lubis, 2019)

Menurut Alonze F.Quin dan Wj Guckian Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perairan yang sudah terlindungi dilengkapi dengan sarana dan prasarana seperti bahan bakar, bengkel, dan alat pengangkut barang lainnya yang berhubungan dengan aktivitas perikanan.(Lubis, 2019)

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk Bahan pertimbangan dalam penelitian ini, penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah penulis baca. Penelitian terdahulu ini juga bermanfaat dalam mengolah dan memecahkan masalah yang berpotensi timbul dari Judul Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Di Pangkalan

PSDKP Kota Batam. Walaupun Lokus dan Fokus juga tidak sama tetapi dapat membantu peneliti untuk menemukan pemecahan masalah dalam Penelitian Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan di Satuan Pangkalan PSDKP Kota Batam dibawah ini adalah hasil penelitian yang peneliti baca yaitu :

- 1) Penelitian Terdahulu oleh Ismajaya yang berjudul Tingkat konsekuensi bahaya pada aktivitas pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan di pos pelayanan Jakarta pada tahun 2019 penelitian ini dipublikasikan oleh Albacore Volume 3 No 1 penelitian menggunakan penelitian Deskriptif dengan metode *HIRA* hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa kegiatan pengawasan yaitu kegiatan sebelum dilakukan pengawasan, kegiatan pengawasan saat kedatangan dan keberangkatan kapal pengangkut atau kapal penangkap ikan, dan kegiatan setelah dilakukan pengawasan. (Purwangka et al., 2019)
- 2) Penelitian terdahulu oleh singgih prihadi aji yang berjudul intensitas kerja pengawas perikanan pada aktivitas patroli laut pengawas sumber daya kelautan dan perikanan di Jakarta pada tahun 2016 penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif numeric dengan metode HTA hierarchical task analysis volume 7 nomor 2 hasil penelitian ini menyimpulkan hasil dari pengawasan dari awal pelaksanaan pengawasan sampai akhir pelaksanaan pengawasan patroli di PSDKP membutuhkan sdm dan usaha kerja dalam melakukan pengawasan patroli laut karna

kurangnya sdm pengawasan yang memiliki potensi terjadinya kecelekaan dan instensitas kegiatan kerja yang sangat tinggi. (Aji et al., 2016)

- 3) Penelitian terdahulu oleh irliyani yang berjudul analisis kinerja pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) di pos pelayanan PSDKP pelabuhan perikanan samudera jakarta pada tahun 2017 volume 6 nomor 4 hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan metode purposive sampling atau pengambilan sampel hasil peneliitian menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan pangkalan PSDKP jakarta sangat baik hal ini dapat dilihat dari score serviquial sangat kecil (Suroyya et al., 2017)
- 4) Penelitian terdahulu oleh dewi indri hapsari yang berjudul analisis kinerja satker pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan PSDKP di pelabuhan perikanan nusantara pelabuhan ratu sukabumi jawa barat pada tahun 2013 volume 2 nomor 1. Hasil penelitian ini menggunakan metode deskriptif berdasarkan kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja di PSDKP dalam pengawasan dilaut kurang baik karena kurangnya kelengkapan sarana dan prasarana tidak mendukung dalam melakukan pengawasan dilaut (Hapsari, 2013)
- 5) Penelitian terdahulu oleh stella anggityrini yang berjudul kinerja satker PSDKP pekalongan dilihat dari aspek perikanan tangkap di pelabuhan perikanan nusantara (ppn) pekalongan pada tahun 2013 volume 2 nomor 1 hasil penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode sample purposive hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja satuan

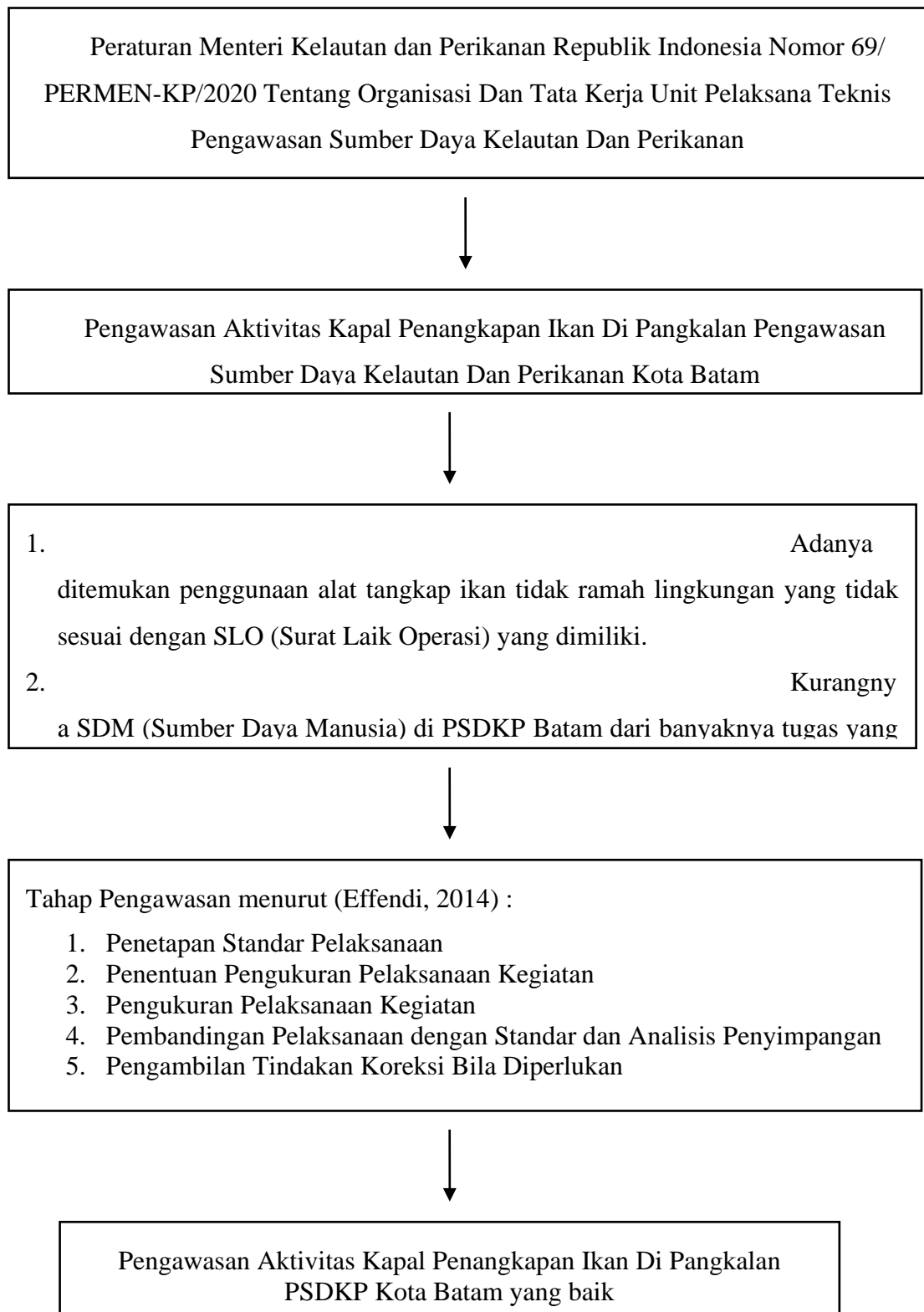
kerja PSDKP pekalongan dalam kualitas pelayanan terbilang sangat baik dengan nilai servqual yang kecil (Pelabuhan et al., 2013)

- 6) Penelitian terdahulu oleh Azhar Abbas yang berjudul Peran Pengawasan Ombudsman dalam Pelayanan Publik dilihat dari aspek pengawasan pada tahun 2020 ISSN 2528-3332 hasil penelitian ini membahas tentang peran pengawasan didalam suatu organisasi yang menyatakan bahwa pengawasan dilakukan untuk mengevaluasi kinerja apakah ada pelanggaran penyelewengan dan sejauh mana kebijakan atasan sudah dilakukan apakah berjalan sesuai rencana atau tidak.(Abbas, 2020)
- 7) Penelitian terdahulu oleh Adwani Sulaiman yang berjudul Peningkatan koordinasi Struktur Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Aceh pada tahun 2020 Vol 22 No 3 (Desember ,2020) ,pp.531-546 hasil penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap nelayan yang menangkap ikan secara illegal dan menangkap ikan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan yang akan merusak ekosistem yang ada dilaut (Sulaiman, 2018)
- 8) Penelitian terdahulu oleh Inda Santi yang berjudul Tindakan Administrasi Keimigrasian Terhadap Pelaku Illegal Fishing pada tahun 2019 Vol 3 No2 Hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif penelitian ini disimpulkan bahwa hambatan yang terjadi didalam pengawasan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana yang kurang mendukung dalam melakukan operasi pengawasan karna banyaknya kapal asing yang menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan diperairan Tanjung

Pinang Kepulauan Riau dan melihat tindakan yang hanya teknis saja tetapi administrative keimigrasian yang ada di Tanjung Pinang .(Santi & Adhayanto, 2019)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan alur pemikiran dalam pembentukan suatu penelitian baik dari latarbelakang masalah, teori-teori pendukung penelitian, masalah-masalah yang teridentifikasi, serta analisis data yang dilakukan. Pada penelitian ini, kerangka pemikiran disajikan dalam bentuk diagram alur pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Universitas Putera Batam

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut sugiyono penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan kondisi objek atau pendekatan yang secara alamiah dimana peneliti adalah satu-satunya objek kunci, sedangkan teknik pengumpulan data pada kualitatif merupakan hasil gabungan yang menekankan makna pada kalimat yang akan diselidiki atau diteliti.

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan saat ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif.

3.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian pengembangan. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menjadikan referensi untuk melakukan pengembangan dengan memfokuskan penelitian ini terhadap kinerja pengawasan aktivitas kapal penangkapan ikan yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori teknik pengawasan (Effendi, 2014), yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. (Syahputra, 2019)

3.3 Lokasi dan Periode Penelitian

3.3.1 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam mengidentifikasi masalah dan menganalisis penelitian yaitu Pangkalan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) Kota Batam yang berada di jalan Jembatan II Barelang, Pulau Nipah, Kecamatan Setokok, Kelurahan Bulang, Kota Batam.

3.3.2 Periode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan data cross section yaitu data yang sesuai dengan jangka pengambilan data. Periode penelitian yang dilakukan oleh peneliti selama melakukan penelitian baik studi Pustaka, pengumpulan data, penyusunan data, analisis dan penarikan kesimpulan, dan penulisan laporan akhir penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Periode Penelitian

NO	Kegiatan	Bulan																			
		September				Oktober				November				Desember				Januari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Pustaka																				
2	Pengumpulan Data																				
3	Penyusunan Data																				
4	Analisis dan Kesimpulan																				
5	Penulisan Laporan Akhir																				
6	Penyerahan Laporan Akhir																				

3.4 Sumber Data

Sumber data adalah pusat informasi data yang ingin kita ketahui , Sumber data terdapat dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data secara langsung ke peneliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung ke peneliti. Sumber data primer peneliti ialah (Kepala pengawasan PSDKP, Pengawasan Perikanan Muda, Prasarana Dan Prasarana, Kapten PSDKP Batam dan Nelayan). Sumber data sekunder peneliti ialah penelitian terdahulu yang diperoleh dari jurnal, buku, dan berita dari website.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Harbani Pasolong yaitu proses paling penting dari pengadaan data primer dalam suatu penelitian .

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung dan tersusun terhadap kejadian yang akan diteliti.

2. Wawancara

wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi dari informan atau responden

Peneliti melakukan wawancara untuk mendapatkan data pendukung dari beberapa narasumber yaitu pegawai PSDKP dan Nelayan.

3. Dokumen

Dengan teknik dokumentasi ini peneliti dapat memperoleh data terkait sejarah di Pangkalan PSDKP Kota Batam.

3.6 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Pada bagian ini, peneliti menentukan variabel penelitian dengan mengacu pada teori pengawasan yang dikemukakan oleh Usman Effendi (2014:212-213) untuk meneliti kinerja pengawasan yang dilakukan oleh PSDKP Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Standar Pelaksanaan

Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah SOP, Sumber Daya Manusia dan Biaya Anggaran.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah laporan hasil kegiatan, jangka waktu dan pihak-pihak yang dilibatkan.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah pengamatan dan laporan pengaduan.

4. Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisis Penyimpangan

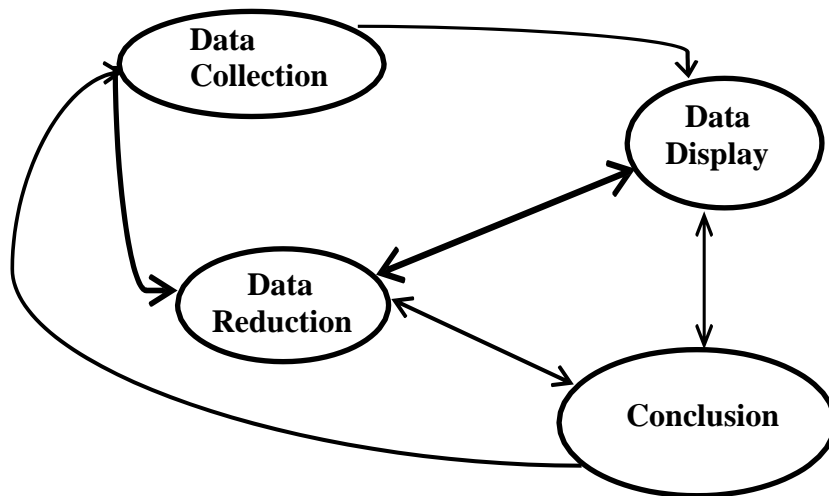
Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah koordinasi dan evaluasi program.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan

Indikator yang digunakan pada tahapan ini adalah evaluasi kinerja dan sanksi.

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam proses penelitian kualitatif untuk memberikan pemahaman hubungan atau gagasan sehingga anggapan dasar masalah dapat dikembangkan lagi dan adanya penilaian dari suatu anggapan dasar yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. menyusun secara sistematis bagian yang ada di lapangan, dokumentasi dan hasil wawancara yang mana yang akan dirangkum untuk dipahami si pembaca dan si penulis dalam melakukan penelitian. Menurut Miles dan Huberman aktivitas analisis data dilakukan secara berulang ulang atau terus menerus sampai selesai atau tuntas (Jejak & Publisher, 2018)



Gambar 3.1 Komponen analisis data (*Interactive model*)

Sumber: (Sugiyono, 2015)

Analisis dalam analisis data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Reduksi Data adalah suatu proses penyederhanaan data mentah untuk memperoleh informasi data yang mendukung dalam penelitian (Jejak & Publisher, 2018)
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk gambar, tabel, grafik dan narasi (Jejak & Publisher, 2018)
3. Pengambilan Kesimpulan/Verifikasi adalah mengutip esensi atau intisari dalam suatu sajian data penelitian dengan kalimat atau pernyataan singkat, padat dan jelas (Jejak & Publisher, 2018)



Universitas Putera Batam